

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

LAPORAN KEUANGAN

BAGIAN ANGGARAN 005.01

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020

Jl. Sutan Syahrir No. 16

Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 73112

Telp. 0532-21014 Fax. 0532-21179

e-mail : pnpbun@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Sutan Syahrir No. 16

Telp. 0532-21014 Fax. 0532-21014

Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 73112

e-mail : pnpbun@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalan Bun, 10 Juli 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



HUSNI THAMRIN, ST
NIP.197803082009041003

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	13
A. Penjelasan Umum	13
A.1. Dasar Hukum.....	13
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	14
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	15
A.4. Basis Akuntansi	15
A.5. Dasar Pengukuran	16
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	16
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	24
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	24
B.2. Belanja.....	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	30
C.1. Aset Lancar.....	30
C.2. Aset Tetap	32
C.3. Aset Lainnya	37
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	38
C.6. Ekuitas	39
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	40
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	40
D.2. Beban Pegawai	40

D.3.	Beban Persediaan	41
D.4.	Beban Barang Dan Jasa	41
D.5.	Beban Pemeliharaan	42
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	43
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	43
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	44
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	44
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	45
D.11.	Beban Lain-lain.....	45
D.12.	Kegiatan Non Operasional	46
D.13.	Pos Luar Biasa	46
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	47
E.1.	Ekuitas Awal	47
E.2.	Surplus (defisit) LO	47
E.3.	Koreksi Nilai Persediaan.....	47
E.4.	Koreksi Aset Tetap	48
E.5.	Koreksi atas Beban	48
E.6.	Koreksi atas Pendapatan.....	48
E.7.	Ekuitas Akhir.....	49
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	49
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	49
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	49
	Daftar dan Lampiran	51
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	52

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No. 16 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 73112

Telp. 0532-21014 Fax. 0532-21014 e-mail : pnpbun@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Bun, 10 Juli 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



HUSNI THAMRIN, ST
NIP.197803082009041003

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Semester I Tahun Anggaran 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2020 s.d. 30 Juni 2020

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 8.834.200 atau mencapai 45 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.19.576.000

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 2.309612.638 atau mencapai 52 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.439.613.000

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember 2019 dan 30 Juni 2020 dapat disajikan sebagai berikut.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp.61.362.089.003, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 51.199.962; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.61.310.889.041; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.48.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 0 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 61.314.089.003

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 30 Juni 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp.11.863.197, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 2.991.187.276 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 2.979.324.079) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.486.849 dan Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp.2.978.837.230)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 61.992.147.795 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp.2.978.837.230) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2.300.778.438 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah senilai Rp.61.314.089.003

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2020, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2020 DAN 30 Juni 2020
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	31 Juni 2020			30 Juni 2020
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	19.578.000	8.834.200	45,12	7.459.200
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		19.578.000	8.834.200	45,12	7.459.200
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	2.951.527.000	1.399.504.709	47,24	1.297.660.859
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.463.086.000	885.107.929	60,5	508.383.059
3.	Belanja Modal	B.2.3.	25.000.000	25.000.000	100,00	0
	Jumlah Belanja Negara		4.439.613.000	2.309.612.638	52,02	1.806.043.918

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN NERACA PER 30 Juni 2019 DAN 31 Desember 2019

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	48.000.000	0
Belanja dibayar dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	807.500
Persediaan	C.1. 3.	3.199.962	4.587.980
Jumlah Aset Lancar		51.199.962	5.395.480
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	51.352.562.000	51.352.562.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	1.948.178.201	1.923.178.201
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	12.804.026.000	12.804.026.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	364.685.000	364.685.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	12.278.469	12.278.469
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(5.170.840.629)	(4.456.267.708)
Aset lain-lain	C.2. 8.	80.970.000	80.970.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 9.	(80.970.000)	(80.970.000)
Jumlah Aset Tetap		61.310.889.041	62.000.461.962
Jumlah Aset		61.362.089.003	62.005.857.442
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada pihak ketiga	C.5. 1.	0	10.680.650
Pendapatan diterima dimuka	C.5. 2.	0	3.028.997
Uang Muka dari KPPN	C.5. 3.	48.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		48.000.000	13.709.647
Jumlah Kewajiban		48.000.000	13.709.647
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Jumlah Ekuitas Dana		61.314.089.002	61.992.147.795
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		61.362.089.003	62.005.857.442

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN LAPORAN OPERASIONAL PER 30 Juni 2020 DAN 30 Juni 2019 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	11.863,197	11.420.197
Jumlah Pendapatan		11.863,197	11.420.197
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	1.396.697.383	1.297.660.859
Beban Persediaan	D. 3	18.486.605	14.775.054
Beban Barang dan Jasa	D. 4	428.397.639	217.793.478
Beban Pemeliharaan	D. 5	410.038.528	226.555.045
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	22.994.200	43.289.663
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	714.572.921	534.532.665
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		2.991.187.276	2.334.606.764
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(2.979.324.079)	(2.323.186.567)
Kegiatan Non Operasional			
D. 12			
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya		602.860	1.022.490
Beban dari kegiatan non operasional lainnya		116.011	162.980
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		486.849	859.510

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 13		
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(2.978.837.230)	(2.322.327.057)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2020 DAN 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Ekuitas Awal	E. 1	61.992.147.795	58.896.965.185
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(2.978.837.230)	(2.322.327.057)
Penyesuaian Nilai Aset		0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi		0	1.624.227
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar			
Lain-lain			
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E. 4	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 5	0	0
Koreksi Atas Beban	E. 6	0	0
Koreksi Atas pendapatan	E. 7	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 8	0	1.624.227
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 9	2.300.778.438	1.798.584.718
Kenaikan / Penurunan Ekuitas		(678.058.792)	(5.22.118.112)
Ekuitas Akhir		61.314.089.003	58.374.847.073

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Visi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah : "TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB YANG AGUNG".

Misi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah Misi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel Terciptanya peningkatan tertib administrasi perkara;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
5. Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan secara Optimal baik Internal maupun Eksternal.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga Peradilan berdasarkan Parameter objektif.
7. Terciptanya peningkatan Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan secara Akuntabel, Efektif, Efisien.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan semester II tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis

kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan semester II tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan

kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp.8.834.200*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 8.834.200 atau mencapai 45,12 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 19.578.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	19.578.000	8.834.200	45,12
2.				
3.				
4.				
	Total Pendapatan	19.578.000	8.834.200	45,12

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.375.000 atau 18,43 persen dibandingkan periode yang sama TA 2019 . Hal ini disebabkan karena :

1. Adanya penyesuaian tarif rumah dinas per bulan April 2020 dengan perhitungan HSBG Pemerintah Kabupaten kotawaringin Barat tahun 2020.

Perbandingan realisasi PNBP 30 Juni 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020 dan 2019

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	8.834.200	7.459.200	1.375.000	18,43
2.					
3.					
4.					
5.					
	Total Pendapatan	8.834.200	7.459.200	1.375.000	18,43

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp.
2.309.612.638*

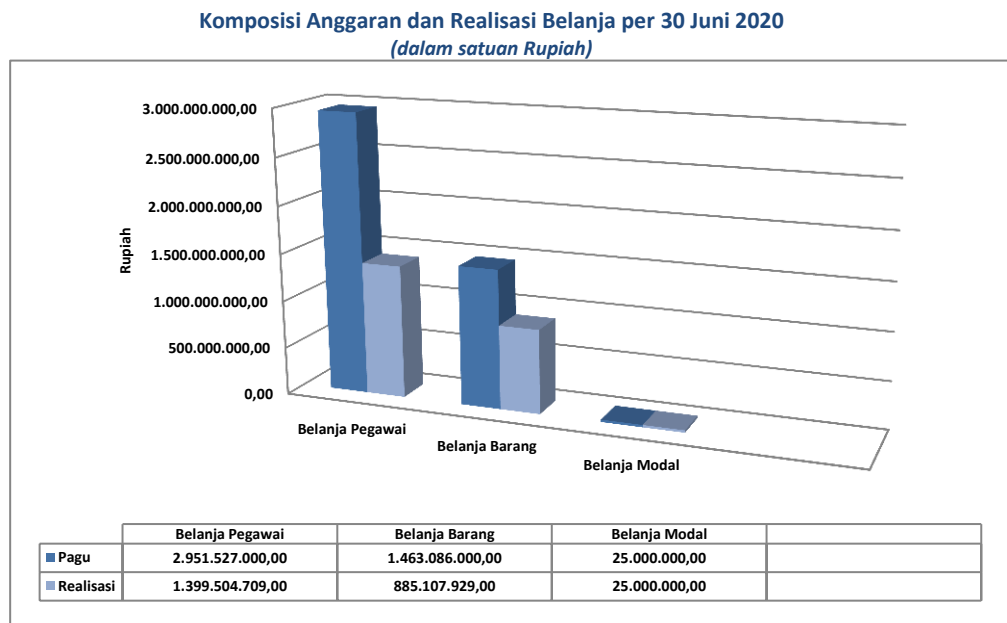
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Pangkalan Bun per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 2.309.612.638 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 47,42 % dari anggaran senilai Rp.4.439.613.000 . Rincian anggaran dan realisasi belanja pada per 30 Juni 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2020

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.951.527.000	1.399.504.709	47,42
Belanja Barang	1.463.086.000	885.107.929	60,50
Belanja Modal	25.000.000	25.000.000	100,00
Total Belanja Bruto	4.439.613.000	2.309.612.638	52,02
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	4.439.613.000	2.309.612.638	52,02

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2020 & 2019

Realisasi Belanja Negara mengalami Penurunan sebesar Rp 503.568.720 atau sebesar 27,88 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena :

1. Terdapat Kenaikan belanja pegawai pada akun tunjangan fungsional dikarenakan ada beberapa hakim yang naik pangkat sehingga menyebabkan penambahan pada tunjangan fungsionalnya
2. Terdapat kenaikan pada pagu belanja pada belanja jasa, khususnya langganan internet dan sudah terealisasi pada bulan januari 2020
3. Pemeliharaan kantor di realisasikan lebih awal di dibandingkan dengan tahun 2019
4. Pagu belanja modal pada tahun 2020 sudah terealisasi pada semester 1 TA 2020

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	1.399.504.709	1.297.660.859	101.843.850	7,84
Belanja Barang	885.107.929	508.383.059	376.724.870	74,10
Belanja Modal	25.000.000	0	25.000.000	100,00
Total Belanja	2.309.612.638	1.806.043.918	503.568.720	27,88

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp.
1.399.504.709*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Bun per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 1.399.504.709 dan 1.297.660.859

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2020 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 101.843.850 atau sebesar 7,8 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai periode yang sama pada TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Terdapat Kenaikan belanja pegawai pada akun tunjangan fungsional dikarenakan ada beberapa hakim yang naik pangkat sehingga menyebabkan penambahan pada tunjangan fungsionalnya

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji				
Pokok PNS	519,436,560	525,745,760	(6.311.200)	(1,2)
Beban	8,910	9,113	(203)	(22,27)
Pembulatan Gaji				
PNS				
Beban Tunj.	45,525,054	43,557,634	1.967.420	4,5
Suami/Istri PNS				
Beban Tunj.	13,753,082	14,013,036	(259.954)	(1,8)
Anak PNS				
Beban Tunj.	14,420,000	14,420,000	0	0
Struktural PNS				
Beban Tunj.	568,715,000	486,295,000	82.420.000	16,94
Fungsional PNS				
Beban Tunj. PPh	72,205,703	60,212,175	11.993.528	19,91
PNS				
Beban Tunj.	30,416,400	31,430,280	(1.015.880)	(3,20)
Beras PNS				
Beban Uang	76,714,000	71,024,000	5.690.000	8,01
Makan PNS				
Beban	9,710,000	10,455,000	(745.000)	(7,12)
Tunjangan Umum PNS				
Beban	48,600,000	40,500,000	8.100.000	20,00

Tunjangan kemahalan Hakim				
Beban Uang	0	0	0	0)
Lembur				
Total Belanja	1,399,504,709	1,297,661,998	101.843.850	(7,8)
Brutto				
Pengembalian	0	0	0	
Belanja				
Total Belanja	1,399,504,709	1,297,661,998	101.843.850	(7,8)
Netto				

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
885.107.929*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Pangkalan Bun per 30 Juni 2020 dan TA 2019 adalah sebesar 885,107,929 dan Rp. 502,239,059

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2020 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 376.724.870 atau 74,10 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang pada periode yang sama TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan Realisasi belanja barang operasional disebabkan adanya kenaikan belanja langganan internet dan kenaikan gaji tenaga kontrak.
2. Kenaikan Belanja pemeliharaan dikarenakan realisasi belanja pemeliharaan sudah terlaksanakan mulai awal tahun

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2020 dan TA 2019

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang operasional	379,292,151	183,801,061	195.491.090	106,36
Belanja Persediaan	16,611,738	13,913,302	2.698.436	19,39
Belanja Barang dan Jasa	56,171,312	40,823,988	15.347.324	37,59
Belanja Pemeliharaan	410,038,528	226,555,045	183.483.483	80,98
Belanja Perjalanan Dinas	22,994,200	37,145,663	(14.151.463)	(38,09)
Total Belanja Brutto	885,107,929	502,239,059	30.605.226	74,10

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja
Modal :Rp.
25.000.000*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 30 Juni 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp25.000.000,00 dan Rp. 0

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2020 mengalami Kenaikan sebesar Rp.25.000.000 atau sebesar 100 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal periode yang sama pada TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Terdapat kenaikan pagu Belanja modal pada tahun 2020 di bandingkan dengan pagu belanja 2019 yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- dikarenakan pengadaan ktelah selesai 100 persen pada semester 1 2020

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0	0	0
Belanja Modal Peralatan & Mesin	25.000.000	0	25.000.000	100
	25.000.000	0	25.000.000	100

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp. 51.199.962

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 51.199.962 dan Rp.5.395.480.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	48.000.000	0
Belanja Dibayar di Muka	0	807.500
Persediaan	3.199.962	4.587.980
Total Aset Lancar	51.199.962	5.395.480

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp48.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 48.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2020	31 Desember 2019
1	Kas Di bendahara Pengeluaran	48.000.000	0
	Jumlah	48.000.000	0

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka: Rp 0*

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 807.500. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2020	31 Desember 2019
1	Persekot Gaji	0	0
2	Sewa Hosting dan Domain	0	807.500
	Jumlah	0	807.500

Saldo belanja di bayar di muka per 31 Desember 2019 pada Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah Rp, 807.500.,Jumlah tersebut merupakan tagihan sewa hosting dari bulan Januari 2020 s/d Oktober 2020.

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp.3.199.962*

Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.199.962 dan Rp. 4.587.980. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019

No.	Uraian	30 Juni 2020	31 Desember 2019
1	Barang Konsumsi	3.199.962	4.587.980
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	3.199.962	4.587.980

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname Fisik No. W16-U3/2617 /PL.03/VI/2020 Tgl 30 Juni 2020.

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap :
Rp.
61.310.889.041*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji sebesar Rp. 61.310.889.041 dan Rp. 62.000.461.962 . Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam

kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2020	31 Desember 2019	Perubahan
1	Tanah	51,352,562,000	51,352,562,000	0
2	Peralatan dan Mesin	1,948,178,201	1,923,178,201	25,000,000
3	Gedung dan Bangunan	12,804,026,000	12,804,026,000	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	364,685,000	364,685,000	0
5	Aset Tetap Lainnya	12.278.469	12.278.469	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	66.481.729.670	66.456.729.670	25.000.000
	Akumulasi Penyusutan	(5,170,840,629)	(4,456,267,708)	(714.572.921)
	Nilai Buku Aset Tetap	61,310,889,041	62,000,461,962	(689.572.921)

C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp.
51,352,562,000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 51.352.562.000 dan Rp. 51.352.562.000

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

NO	TANAH LOKASI/PERUNTUKAN	DOKUMEN SUMBER			LAPORAN BMN 30 Juni 2020		
		LUAS SERTIFIKAT	NO. SERTIFIKAT	JENIS HAK	KIB	Atas Nama	NILAI
A	TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH						
1	Gedung Kantor di Jl. Sutan Syahrir No. 16	8.000	2	Hak Pakai	2	Pemerintah RI Cq MARI	35.014.578.000
2	Gedung Kantor Tempat Sidang Di Sukamara	8.288	3	Hak Pakai	3	Pemerintah RI Cq MARI	7.088.143.000
3	Gedung Kantor Tempat Sidang Di Pangkut	10.000	216	Hak Pakai	1	Pemerintah RI Cq MARI	569.600.000
B	TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA GOL II						
1	Jl. Jend. Sudirman	1.364	33	Hak Pakai	5	Pemerintah RI Cq MARI	1.377.585.000
2	Jl. Sudirman SH	2.016	82	Hak Pakai	4	Pemerintah RI	1.960.399.000

						Cq MARI	
3	Jl. Achmad Wongso	2.960	34	Hak Pakai	3	Pemerintah RI Cq MARI	2.980.217.000
4	Jl. Sutan Syahrir Gg. Lombok	1.350	5	Hak Pakai	2	Pemerintah RI Cq MARI	1.373.031.000
5	Jl. Domba	995	SERTIFIKAT BELUM ADA		1	-	989.009.000
JUMLAH							51.479.577.285

Tidak Terdapat Mutasi kurang Tanah di Semester I Tahun anggaran 2020

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp.
1,948,178,201*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.948.178.201 dan Rp1.923.178.201

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	1.923.178.201
Mutasi Tambah	
Pengadaan Peralatan dan Mesin	25.000.000
Hibah masuk	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2019	1.948.178.201
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	(1.463.154.984)
Nilai Buku 30 Juni 2020	485.023.217

Terdapat Mutasi tambah peralatan dan mesin di Tahun anggaran 2019 yaitu :

- Pembelian barang
 - P.C All in one yang di peruntukan untuk Kepaniteraan dengan Merk Acer Aspire sebanyak 2 unit @Rp. 12.500.000 dengan total Rp. 25.000.000
- Hibah

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
12,804,026,000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 12,804,026,000 dan Rp12,804,026,000

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	12,804,026,000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2019	12,804,026,000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	(3.610.705645)
Nilai Buku 31 Desember 2019	9.193.320.355

Tidak terdapat Mutasi Gedung di semester I Tahun anggaran 2020, yaitu

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp.
364,685,000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 364,685,000 dan Rp. 364,685,000

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	364,685,000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2019	364,685,000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	(96.980.000)
Nilai Buku 31 Desember 2019	267.705.000

Tidak terdapat Mutasi Jalan , Irigasi, dan Jaringan di semester I Tahun anggaran 2020.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp.
12.278.469*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 12.278.469 dan Rp. 12.278.469.

Tidak ada Mutasi aset tetap lainnya per 30 Juni 2020.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	12.278.469
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2019	12.278.469
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku 31 Desember 2019	12.278.469

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi
dalam
Pengerjaan : Rp.
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp.
(5,170,840,629)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp.(5,170,840,629) dan Rp.(4,456,267,708).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan

berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2020 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	51,352,562,000	0	51.352.562.000
2	Peralatan dan Mesin	1,948,178,201	(1.463.154.984)	485.023.217
3	Gedung dan Bangunan	12,804,026,000	(3.610.705.645)	9.193.320.355
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	364,685,000	(96.980.000)	267.705.000
5	Aset Tetap Lainnya	12.278.469	0	12.278.469
Jumlah		66.481.729.670	(5,170,840,629)	61,310,889,041

Aset Lainnya:
Rp. 80.970.000

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 80.970.000 dan Rp. 80.970.000 Aset Lainnya merupakan asset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2020	31 Desember 2019
1	Aset Lain-lain	80.970.000	80.970.000
	Nilai perolehan Aset Lainnya	0	0
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(80.970.000)	(80.970.000)
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

C.4.1. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :
Rp. 80.970.000*

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp80.970.000 dan Rp. 80.970.000 Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Pangkalan Bun serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2018	80.970.000
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	0
Nilai perolehan Aset Lainnya	80.970.000
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(80.970.000)
Nilai buku Aset Lainnya	0

Tidak ada Mutasi asset lain-lain di Tahun anggaran 2020

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek
:
Rp. 48.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 48.000.000 dan Rp. 13.709.647 Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun per 30 Juni 2020 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember 2019
Uang muka dari KPPN	48.000.000	0
Pendapatan Diterima Dimuka		3.028.997
Utang Kepada Pihak Ketiga		10.680.650
Jumlah	48.000.000	13,709.647

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp.0*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 10.680.650. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Negeri Pangkalan Bun per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Beban Langganan PDAM	0	
2	Beban Langganan Litrik	0	
3	Beban Langganan telepon	0	
4	Beban Langganan Spedy PN P.Bun	0	
5	Beban Kekurangan Gaji pegawai	0	
	Jumlah	0	

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN:
Rp. 48.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 48.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp.61.314.089.
003*

Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 61,314,089,003 dan Rp 61,992,147,795. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbp :
Rp11,863,197*

Jumlah Pendaatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp 11,863,197 dan Rp 11,420,197 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Negara Bukan pajak Lainnya	11,863,197	11,420,197	3,97
	Total Pendapatan	11,863,197	11,420,197	3,97

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai
: Rp.
1,396,697,383*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,396,697,383 dan Rp. 1,297,660,859 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	516,974,760	525,745,760	(8,771,000)	(1.66)
Beban Pembulatan Gaji PNS	8,036	7,974	62	0.77
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	45,278,874	43,557,634	1,721,240	3.95
Beban Tunj. Anak PNS	13,654,610	14,013,036	(358,426)	(2.55)
Beban Tunj. Struktural PNS	14,420,000	14,420,000	0	16.94
Beban Tunj. Fungsional PNS	568,715,000	486,295,000	82,420,000	16.94

Beban Tunj. PPh PNS	72,205,703	60,212,175	11,993,528	19.91
Beban Tunj. Beras PNS	30,416,400	31,430,280	(1,013,880)	(3.22)
Beban Uang Makan PNS	76,714,000	71,024,000	5,690,000	8.01
Beban Tunjangan Umum PNS	9,710,000	10,455,000	(745,000)	(7.12)
Beban Tunjangan Kemahalan	48,600,000	40,500,000	8,100,000	20.00
Hakim				
Total Beban Pegawai	1,396,697,383	1,297,660,859	99,036,524	7.64

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp. 18,486,605*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 18,486,605 dan Rp. 14,775,054. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	18,486,605	14,775,054	3,711,551	25.12
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	18,486,605	14,775,054	3,711,551	25.12

D.4. Beban Barang Dan Jasa

*Beban Jasa :
Rp.
428,397,639*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 428,397,639 dan Rp. 217,793,478. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	323,638,500	141,650,100	181,988,400	128.47
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,458,000	8,047,000	(2,589,000)	(32.17)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	18,120,000	18,120,000	0	0
Beban Barang Operasional Lainnya	17,448,000	15,839,961	1,608,039	10.15
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID- 19	14,483,651	0	14,483,651	100.00
Beban Langganan Listrik	34,632,054	33,292,030	1,340,024	4.02
Beban Langganan Telepon	611,434	712,187	(100,753)	(14.14)
Beban Langganan Air	66,000	132,200	(66,200)	(50.07)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	13,940,000	0	13,940,000	100
Total Beban Barang Dan Jasa	428,397,639	217,793,478	210,604,161	96.69

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp.
410,038,528

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 410,038,528 dan Rp. 226,555,045. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	329,461,614	164,451,080	165,010,534	100.34
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	50,039,000	13,313,362	36,725,638	275.85
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30,537,914	48,790,603	(18,252,689)	(37.41)
Total Beban Pemeliharaan	410,038,528	226,555,045	183,483,483	80.98

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
22,994,200*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 22,994,200 dan Rp. 91.077.800. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	22,994,200	43,289,663	(20,295,463)	(46.88)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota				
Beban Perjalanan Dinas paket meeting luar kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	22,994,200	43,289,663	(20,295,463)	(46.88)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp. 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Naik(Turun)	%
Beban barang diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp. 0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. 714,572,921

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 714,572,921 dan Rp. 534,532,665. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	97,393,784	76,713,775	20,680,009	26.95
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	602,306,637	440,450,390	161,856,247	36.74

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14,872,500	17,368,500	(2,496,000)	(14.37)
Beban Penyusutan Aset lain- lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi				
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	714,572,921	534,532,665	180,040,256	33.68

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp.0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak terttagih – Piutang Jangka pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak terttagih – Piutang Jangka panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp.*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0

Peralatan dan Mesin

Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp. 486,849

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Nonancar	0	0	0	0
Pendapatan penyesuaian nilai persediaan	602,860	1,022,490	(419,630)	(41.04)
Beban penyesuaian nilai persediaan	116,011	162,980	(46,969)	(28.81)
Surplus dari kegiatan nonoperasional lainnya	486,849	859,510	(372,661)	(43.35)
Penjualan Alat Kantor	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	486,849	859,510	(372,661)	(43.35)

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.61.992.147.⁷⁹⁵ dan Rp. 61.314.089.003

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar (Rp. 2.978.837.230) dan Rp. (Rp. 2.322.327.057) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan : Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4. Koreksi Aset Tetap

*Koreksi Aset
Tetap : Rp.0*

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai nilai asset non revaluasi dan revaluasi.

E.5. Koreksi atas Beban

*Koreksi Aset
Beban : Rp0*

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Koreksi atas Beban
per 30 Juni 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Beban Pegawai	0
Beban Jasa	0
Total Koreksi atas beban	0

E.6. Koreksi atas Pendapatan

*Koreksi atas
Pendapatan :
Rp0*

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Koreksi atas Pendapatan
per 30 Juni 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	0
Pendapatan Lainnya	0
Total Koreksi atas Pendapatan	0

E.7. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2020 masing-
Rp
61.314.089.003 masing sebesar Rp 61.314.089.003 dan Rp 58.374.847.073

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada pendapatan dan belanja secara akrual di semester I 2020

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah :

1. BRI CABANG PANGKALAN BUN A/C 0282-01-000020-30-5 a.n. BPg 102 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.0. Persetujuan kembali atas pembukaan rekening Pengadilan Negeri Pangkalan Bun di keluarkan oleh Kepala KPPN Pangkalan Bun No. S-860/WPG.18/Kp.102/2015 Tanggal 30 Juli 2015.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Revisi Ke – 1 oleh Kanwil Perbendaharaan Kalimantan tengah untuk Tema revisi administrasi yang disebabkan kesalahan administrasi dan revisi POK dengan mekanisme revisi perubahan rencana penarikan dana/rencana penerimaan dalam halaman III DIPA dan pergeseran anggaran antar komponen
- 2) Revisi Ke – 2 oleh Kanwil Perbendaharaan Kalimantan tengah untuk Tema revisi administrasi yang disebabkan kesalahan administrasi dan revisi POK dengan mekanisme revisi perubahan rencana penarikan dana/rencana penerimaan dalam halaman III DIPA dan pergeseran anggaran antar komponen

- 3) Revisi Ke – 3 oleh Kanwil Perbendaharaan Kalimantan tengah untuk Tema revisi administrasi yang disebabkan kesalahan administrasi dan revisi POK dengan mekanisme revisi perubahan rencana penarikan dana/rencana penerimaan dalam halaman III DIPA dan pergeseran anggaran antar komponen
- 4) Revisi Ke – 4 oleh Kanwil Perbendaharaan Kalimantan tengah untuk Tema revisi administrasi yang disebabkan kesalahan administrasi dan revisi POK dengan mekanisme revisi perubahan rencana penarikan dana/rencana penerimaan dalam halaman III DIPA dan pergeseran anggaran antar komponen

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada ralat SPM, SSBP dan SSPB pada Tahun 2020

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya yang perlu di sampaikan dalam laporan ini.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020

Akun Neraca/Kelompok Barang			Saldo Per 30 Juni 2020				
Kode	Uraian	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan s/d Periode ini	Beban Penyusutan periode ini	Akumulasi Penyusutan s/d Periode ini	Nilai Buku
132111	PERALATAN DAN MESIN		1.923.178.201	1.179.908.643	185.852.557	1.365.761.200	557.417.001
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT	7	326.084.828	326.084.828	0	326.084.828	0
3.05.01	ALAT KANTOR	5	178.584.100	88.709.440	22.562.420	111.271.860	67.312.240
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	5	462.185.730	261.674.268	64.192.042	325.803.310	136.382.420
3.06.01	ALAT STUDIO	5	42.784.000	17.384.200	6.143.200	23.527.400	19.256.600
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	5	9.150.000	4.000.000	1.030.000	5.030.000	4.120.000
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR	5	132.800.000	7.490.000	13.280.000	20.770.000	112.030.000
3.10.01	KOMPUTER UNIT	4	545.515.120	368.296.240	51.180.780	419.477.020	126.038.100
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	4	226.074.423	106.269.667	27.527.115	133.796.782	92.277.641
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		12.804.026.000	1.349.303.502	1.207.560.039	3.008.399.008	9.795.626.992
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	50	9.816.661.000	1.232.883.993	1.123.350.301	2.872.508.063	6.944.152.937
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG RUMAH	50	2.987.365.000	116.419.509	84.209.738	135.890.945	2.851.474.055
134111	JALAN DAN JEMBATAN		364.685.000	52.105.500	31.681.250	82.107.500	282.577.500
5.01.1	JALAN	10	364.685.000	52.105.500	31.681.250	82.107.500	282.577.500
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		80.970.000	192.594.500	-111.624.500	80.970.000	0
3.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG	10	9.975.000	9.975.000	0	9.975.000	0
3.05.01	ALAT KANTOR	5	26.220.000	26.220.000	0	26.220.000	0
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	5	29.411.000	29.411.000	0	29.411.000	0
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	5	1.363.000	1.363.000	0	1.363.000	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT	4	10.601.000	10.601.000	0	10.601.000	0
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	4	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	0
4.01.01	BANGUNAN TEMPAT KERJA	50	0	111.624.500	-111.624.500	0	0

*B. INFORMASI PENDAPATAN
DAN BELANJA SECARA
AKRUAL*

NIHIL

DRAFT